

**PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

(Studi pada PT Kereta Api Indonesia)

DRAFT SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

RETNO WINDASARI

114020499



PRORAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PASUNDAN

2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT Kereta Api Indonesia.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif asosiatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan metode sampling jenuh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, korelasi, pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F serta analisis koefisien determinasi. Banyaknya populasi penelitian adalah 60 orang, sampel penelitian yang digunakan adalah 60 orang dengan sumber data yang diperoleh melalui hasil pengisian kuestioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial audit internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*. Dimana besarnya pengaruh audit internal sebesar 36,5 %, dan sistem informasi akuntansi sebesar 11,2 % terhadap *Good Corporate Governance*. Secara simultan audit internal dan sistem informasi akuntansi 47,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 52,3 merupakan pengaruh faktor lain diluar ketiga variabel independen yang sedang diteliti, seperti pengendalian internal dan faktor kemampuan.

Kata Kunci : Audit internal, Sistem Informasi Akuntansi, *Good Corporate Governance*.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of internal audit and accounting information system of Good Corporate Governance (GCG) in PT Kereta Api Indonesia.

The approach in this research is descriptive associative approach using primary data. The sampling technique used is sampling nonprobability with saturated sampling method. The statistical analysis used in this study is the classical assumption test, regression analysis, correlation, hypothesis testing using t test and F as well as the coefficient of determination. The number of the study population was 60 people, the study sample used was 60 with the source data obtained through filling questionnaire results.

Based on the results of research conducted showed that partial internal audit and accounting information systems affect the GCG. Where the effect of a 36.5% internal audit, and information systems accounting for 11.2% of the good corporate governance. Simultaneously, internal audit and accounting information systems while the remaining 47.7% of 52.3 is the influence of other factors beyond the three independent variables being studied, such as internal control and the ability factor.

Keywords: Internal Audit, Accounting Information Systems, Good Corporate Governance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zaman modern saat ini identik dengan cepat, instan dan mudah. Perkembangan pesat juga terjadi hampir disemua bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis. Perkembangan dibidang bisnis yang sangat kompetitif menuntut para pelaku bisnis untuk selalu berinovasi demi mempertahankan eksistensi nya. Penyediaan informasi yang cepat dan tepat waktu menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisni untuk pengambilan keputusan supaya bisnis yang merak jalani terus bertahan atau bahkan menguasai pasar.

Untuk mencapai penyediaan informasi perusahaan pelaku bisnis harus memahami apa itu sistem informasi akuntansi demi tersedianya informasi perusahaan todak hanya cepat dan tepat waktu tetapi juga berkualitas. Terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang dari tahun ketahun bertambah banyak dan berkembang pesat. Persaingan yang semakin tinggi diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, menuntut perusahaan untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain, maka dibutuhkan management perusahaan yang baik dan terarah. Penyajian yang baik, akurat dan akuntabilitas sangat di pengaruhi oleh sistem informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan tersebut.

Dalam UU no.1 / 2001 tentang perbendaharaan negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan dan fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Rachmawati, Sistya (2008) Internal audit merupakan suatu fungsi penilai independen yang menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian akan kontrol, kinerja, resiko dan tata kelola (*governance*) perusahaan publik maupun privat untuk menyajikan pencapaian tujuan langsung organisasi.

Sedang tugas internal audit masih menurut Rachmawati, Sistya (2008) tugas internal audit langsung berkaitan dengan pencegahan tindakan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah, independen terhadap terhadap aktivitas yang diaudit tetapi internal audit siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua lingkungan manajemen.

Ridwan (2010) mengungkapkan pada dasarnya Tujuan Sistem Informasi Akuntansi yaitu menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal harus mempunyai tujuan sehingga mampu memberikan pedoman dalam perencanaan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* entitas memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan.

Menurut Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah (2011), kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit dalam operasional perusahaan, pemeriksaan prosedur yang diterapkan perusahaan dan pemeriksaan terhadap karyawan yang dicurigai bermasalah yang berakibat adanya orang atau oknum didalam perusahaan yang masih melanggar aturan administratif yang berakibat terjadinya pelanggaran berupa pembobolan dana nasabah.

Penerapan proses GCG dalam suatu perusahaan merupakan proses yang tidak mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen dan pemahaman tentang bagaimana seharusnya proses tersebut dijalankan dalam perusahaan. Dalam perusahaan publik maupun di BUMN penerapan proses GCG belum diterapkan dan dipahami seutuhnya. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus – kasus yang terjadi.

Krisis ekonomi yang menghantam asia telah lebih dari 8 tahun. Krisis ini ternyata berdampak luas terutama dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di korea selatan, Thailand dan Indonesia. Di negara korea selatan dengan adanya kejahatan *financial* yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan blue-chip, kini telah pulih. Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun negara-negara ASEAN lainnya. Era pascakrisis ditandai dengan goncangan ekonomi berkelanjutan mulai dari restrukturisasi sector perbankan, pelelangan asset para konglomerat, yang berakibat pada penurunan iklim berusaha (Bakrie, 2003).

Tantangan yang ada pada saat ini sedang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya (Daniri, 2005). Komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating Implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh *Standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moody's Morgan, and Calpers's*. Dalam kajian yang di ungkapkan oleh *Price water house Coopers* yang dimuat di dalama *Report on Institutional Investor Survey (2002)* menempatkan Indonesia diurutan paling bawah bersama china dan india dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27% sedangkan ditahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan persepsi investor terhadap resiko tidak dijalankanya GCG, menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati singapura dengan skor 3,62, Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19.

Studi yang dilakukan oleh *Credit Lyonnais Asia* melalui *Corporate Governance Watch* dalam buku Bank Indonesia memperlihatkan hal sebagai berikut :

Tabel 1.1

Market Ranked by *Corporate Governance* Tahun 2010 – 2014

CG watch market scores 2010 to 2014.

COUNTRY	2010	2012	2014	Change 2010- 2014	Trend of CG reform
Hongkong	65	66	65	(-1)	<i>weak leadership, tough enforcement</i>
Singapore	67	69	64	(+ 5)	<i>international vs local contrast continues</i>
Japan	57	55	60	(+5)	<i>landmark changes, can they be sustained</i>
Thailand	55	58	58	-	<i>improving but new legislation needed</i>
Malaysia	52	55	58	(+3)	<i>improving bu still too top down</i>
Taiwan	55	53	56	(+3)	<i>bold policy moves can they be sustained</i>
India	48	51	54	(+3)	<i>boouncing back, delhi more supportive</i>
Korea	45	49	49	-	<i>indifferent leader more active regulatorboouncing back, delhi more supportive</i>
China	49	45	45	-	<i>focus on soe reform, enforcement</i>
Philipines	37	41	40	(-1)	<i>slow reform, improved company reporting</i>
Indonesia	40	37	39	(+2)	<i>big ambitions, can they be achieved</i>

Sources : Asian Corporate Governance Assosiation

Tabel 1.2

Market Category scores : CG Watch 2014

Market category scores					
%	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	CG Culture
1. Hongkong	65	61	71	69	51
2. Singapore	64	63	56	64	54
3. Japan	60	48	62	61	55
4. Thailand	58	62	51	48	50
5. Malaysia	58	55	47	59	43
6. Taiwan	56	48	47	63	47
7. India	54	57	46	58	51
8. Korea	49	46	46	45	34
9. China	45	42	40	44	34
10. Philipines	40	40	18	42	33
11. Indonesia	39	34	24	44	32

Source : *Asian Corporate Governance Association*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pencapaian implementasi CG Indonesia berada pada tahapan paling rendah dimana tahapan yang berhubungan dengan pemahaman terhadap keberadaan berbagai aspek CG.

Berdasarkan hasil studi *Asian Development Bank* (ADB) terhadap negara-negara di asia, tidak diterapkannya *Corporate Governance* bisa berdampak fatal bagi perekonomian suatu negara bahkan bisa berdampak pula bagi negara sekitarnya. Hasil laporan tersebut menunjukkan lemahnya *Corporate Governance* yang merupakan

salah satu faktor utama dari krisis ekonomi di Asia Tenggara pada kurun waktu 1997-1998 (Sjafruddin, 2007).

Laporan tentang GCG menurut *Asian Corporate Governance association* (2014), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 39 di bandingkan dengan tahun 2010 di angka 40. Pada tahun 2012 ada penurunan 3 angka dimana menjadi 37. Pergerakan CG pada tahun 2012 yang asalnya 37 naik menjadi angka 39 naik 2 tahap di bandingkan dengan tahun 2012. Meskipun skor Indonesia di tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan 2014, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara negara-negara asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *Corporate Governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Assosiation* didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.

Kasus audit umum yang dialami oleh PT Kereta Api Indonesia menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan

auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. (Ekap Nugraha Agung, 2012).

Manipulasi Laporan Keuangan PT. KAI. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI.

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp

95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan. (www.antaranews.com).

Dalam melakukan tata kelola yang baik maka perlunya auditor yang baik dan profesional. Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor internal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-Undang dan peraturan masyarakat. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor internal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern (Mulyadi 2009:158).

Kasus audit umum yang dialami oleh PT. KAI menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik, karena terdapat perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi sebagai sebab utama, sehingga manajemen melakukan banyak salah saji material menurut komisaris, auditor eksternal tidak mengoreksi salah saji tersebut, dan komite audit menolak menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit. Sebab-sebab tersebut dilihat

dari pihak-pihak yang berinteraksi dengan audit, ketiadaan tata kelola yang baik juga membuka komite audit PT. KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah di audit akuntan publik.

(<http://PutriJulaiha.Wordpress.Com.2012/05/09>).

Kasus PT. KAI bermuara pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris bersumber pada perbedaan pendapat atas 5 (lima) hal, yaitu :

1. Masalah piutang PPN. Piutang PPN senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor. Manajemen menganggap bahwa pemberian jasa yang dilakukannya tidak kena PPN, namun karena Dirjen Pajak menagih PPN atas jasa tersebut, PT. KAI menagih PPN tersebut kepada pelanggan.
2. Masalah Beban Ditangguhkan yang berasal dari penurunan nilai persediaan. Saldo beban yang ditangguhkan sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan. Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban.
4. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYBDS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca.
5. Masalah Uang Muka Gaji. Biaya dibayar di muka sebesar Rp 28 Milyar yang merupakan gaji bulan Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

Dari penjabaran diatas dalam Pengaplikasian *Good Corporate Governance* perusahaan di PT KAI dapat di jabarkan sebagai berikut :

a. Kewajaran

PT KAI tidak memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. PT Kai mengistimewakan PT Pertamina, PT Bukit asam, dan PT semen batu raja dan PT Wira Daya lintas dengan tidak segera menagih pajak terutang.

b. Transparansi

PT KAI tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. PT KAI salah menyatakan pajak terutang pihak ketiga sebagai piutang. Selain itu PT KAI juga salah menyatakan nilai persediaan. Dewan komisaris PT KAI dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi. Dewan komisaris sebaiknya mencoba menyelesaikan konflik secara internal terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan kepada masyarakat, sehingga tidak merusak citra PT KAI.

c. Akuntabilitas

PT KAI tidak menjalankan prinsip akuntabilitas. PT KAI gagal membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya

d. Pertanggung jawaban

PT KAI melanggar prinsip pertanggung jawaban. PT KAI gagal memberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan karena mengalami kerugian akibat pajak terutang pihak ketiga.

e. Kemandirian

PT KAI tidak menjalankan prinsip kemandirian. PT KAI mengambil keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dari upaya PT KAI mengakui hutang pajak ketiga sebagai piutang yang bertentangan dengan undang-undang.

Beberapa hal yang diidentifikasi turut berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api, adalah :

1. Auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit, yang berperan hanya auditor eksternal.
2. Komite audit tidak ikut dalam proses penunjukkan auditor sehingga tidak terlibat dalam proses audit.
3. Manajemen (termasuk auditor internal) tidak melaporkan pada komite audit, dan komite audit juga tidak menanyakannya.
4. Adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun, sehingga ketika komite audit mempertanyakannya, manajemen merasa tidak yakin.

Keberhasilan penerapan GCG juga tidak terlepas dari peran internal control yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* serta menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan internal control dalam sebuah organisasi internal control mencakup lima kategori kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Kelima kategori tersebut merupakan komponen dari internal control yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2). penilaian risiko, (3). informasi dan komunikasi, (4). aktivitas pengendalian dan (5). pemantauan. Morita Indah Lestari (2008).

Menurut Denti, Yesi (2009) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan:

“sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*)

secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*”.

Keberadaan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia dengan segala peran, bentuk kontribusinya terhadap perekonomian serta potensi-potensiyang dimilikinya, sehingga dapat menjadi lokomotif ataupun pelaku ekonomi yang handal yang dapat mendukung, baik Visi dan Misi Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, mewujudkan demokrasi dan pemerataan keadilan, bidang-bidang atau program-program yang tertuang dalam 2010-2014, maupun dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian BUMN, yakni mewujudkan BUMN menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi. Peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengawasan BUMN dalam melaksanakan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang dicantumkan dalam Renstra Kementerian BUMN 2010-2014, dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi maupun dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam pembinaan BUMN seperti yang tercantum dalam RPJM 2010-2014, secara bertahap dan berkesinambungan, dalam kerangka untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menjadi sangat penting artinya. Segala upaya yang telah dilakukan selama ini, baik yang telah berhasil, sedang dalam penyelesaian, belum berhasil maupun yang masih akan dilakukan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi/efektifitas perusahaan sehingga kinerja dan nilai perusahaan meningkat. Yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional. Seluruh pemangku kepentingan

(*stakeholders*) diharapkan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan BUMN dan menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk mendukung peningkatan peran dan kualitas pembinaan dan pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja atau nilai dan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan keputusan menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011, tanggal 1 agustus 2011 dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Seluruh BUMN diwajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* serta konsisten dan menjadikan *GCG* landasan operasionalnya. *ogood corporate governance* dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap asset-assetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan sehingga memiliki nilai tambah (*Values added*).

Peranan Audit internal secara profesional adalah bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, mendeteksi kecurangan, untuk memenuhi tujuan pemeriksaan guna melindungi aktiva perusahaan serta memberikan jasa konsultasi kepada pihak manajemen dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan *Good Corporate Governance* guna menopang terwujudnya perusahaan yang sehat. Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good*

Corporate Governance (GCG). Menurut Darmawati, deni (2006) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan yang meliputi :

- 1) *Fairness* (Keadilan)
- 2) *Transparancy* (Transparansi)
- 3) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 4) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
- 5) *Indenpedency* (Independensi)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan judul penelitian pada latar belakang penelitian. Maka masalah penelitian yang dapat diidentifikasi oleh penulis yang akan di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan audit internal pada PT KAI.
2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada PT KAI.
3. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT KAI.
4. Seberapa besar pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate governance* secara parsial pada PT KAI.

5. Seberapa besar pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate governance* secara simultan pada PT KAI.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil identifikasi masalah penelitian di atas, maka dapat dapat dijelaskan tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Audit internal yang diterapkan pada PT. KAI
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. KAI
3. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. KAI
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance* secara parsial pada PT. KAI
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance* secara simultan pada PT. KAI

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di dapat penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan dalam ilmu akuntansi mengenai audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance*.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori secara literature-literatur lainya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan praktis mengenai pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance*, serta masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan operasional di perusahaan dilapangan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang dapat diperkuliahan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan pemikiran dan pandangan mengenai pengaruh audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dijadika pertimbangan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan dalam menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan selanjutnya.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang audit internal dan sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance* sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di perusahaan BUMN yang ada di kota Bandung yaitu di PT. Kereta Api Indonesia (Jln. Perintis Kemerdekaan No.1).